

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa asing yaitu *Co-Operation* dimana *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti usaha sehingga secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Subandi (2013:2) mengemukakan pengertian koperasi adalah “Suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”. Menurut Kanaidi (2015:5) pengertian koperasi:

Koperasi adalah sekumpulan orang yang bersepakat untuk bersama-sama menjalankan (menyelenggarakan) suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh mereka sendiri secara demokratis berdasarkan pola dan peraturan tertentu untuk memperbaiki keadaan mereka dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang secara sukarela mempersatukan diri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan memanfaatkan sumber daya ekonomi anggota sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi

Landasan koperasi adalah dasar atau pedoman yang harus dimiliki oleh setiap koperasi dalam menentukan arah, tujuan dan kegiatan koperasi. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 secara rinci landasan koperasi yaitu:

1. Landasan Idil
Koperasi memiliki landasan idil Pancasila. Artinya, koperasi harus mendasarkan dirinya kepada Pancasila dalam upaya mencapai cita-citanya.
2. Landasan Struktural
Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945. Secara eksplisit pasal 33 ayat 1 tidak menyebutkan koperasi sebagai salah satu bangun struktural perekonomian Indonesia. Tetapi, kata-kata asas kekeluargaan yang dapat menjamin keberadaan struktural koperasi (kekeluargaan) merupakan asas bagi seluruh koperasi.
3. Landasan Mental
Koperasi memiliki landasan mental berupa kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Maksudnya, di antara sesama anggota koperasi harus ada rasa kesetiakawanan, kebersamaan, rasa kekeluargaan, sadar akan pentingnya bekerja sama dan sekaligus mempunyai rasa percaya diri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan landasan dan asas koperasi terdiri dari landasan idil, landasan struktural dan landasan mental

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 4 menyatakan fungsi dan tujuan koperasi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan mengenai fungsi dan tujuan koperasi, dapat dinyatakan, fungsi dan tujuan koperasi adalah membangun, mengembangkan, mempertinggi, memperkokoh dan mewujudkan perekonomian.

2.1.4 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan prinsip-prinsip koperasi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha (keuntungan) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan prinsip-prinsip koperasi adalah sukarela, terbuka, demokratis, adil, balas jasa terbatas terhadap modal dan kemandirian.

2.1.5 Jenis-jenis Koperasi

Secara umum, berdasarkan jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

2. Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

3. Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi pasar yang beranggotakan para pedagang pasar.

4. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.

5. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan jenis-jenis koperasi terdiri dari koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi serba usaha (KSU), koperasi pasar (Kopas), koperasi konsumsi dan koperasi produksi.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Baridwan (2011:17) pengertian laporan keuangan adalah: “Ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan”.

Menurut Aliminsyah dan Padji (2011:225), “laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan”. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan rugi atau laba dan laporan perubahan posisi keuangan.

Berdasarkan pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan yang dibuat dari hasil akhir proses akuntansi yang telah dilakukan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan diperlukan untuk melakukan evaluasi atas kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2014:10) yakni:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini
3. Memberikan informasi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai tujuan laporan keuangan, maka dapat dikemukakan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kinerja dan perubahan posisi keuangan, pengambilan keputusan, informasi tentang jenis dan jumlah harta, kewajiban, pendapatan dan biaya.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Kasmir (2014:58), ada lima jenis laporan keuangan yaitu:

1. Neraca (*Balance Sheet*)
Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang) dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.
2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)
Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal (*Capital Statement*)
Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal.
4. Laporan Arus Kas (*Cash Flow*)
Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan

perusahaan, baik yang berpengalaman langsung atau tidak langsung terhadap kas.

5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan jenis-jenis laporan keuangan terdiri dari neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi (*income statement*), laporan perubahan modal (*capital statement*), laporan arus kas (*cashflow*) dan laporan catatan atas laporan keuangan.

2.2.4 Sifat Laporan Keuangan

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. Bersifat historis

Bersifat historis artinya laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).

2. Menyeluruh

Sifat menyeluruh artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan yakni sifat laporan keuangan adalah historis dan menyeluruh.

2.2.5 Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Dermawan (2013), pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan yakni:

1. Pemilik atau Pemegang Saham (*Stock Holder*)

Mereka ini sangat berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan saat ini, sekaligus melihat kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya berkaitan erat dengan sukses tidaknya perusahaan dalam menghasilkan laba

atau keuntungan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham.

2. Manajemen (*Management*)

Secara garis besarnya sebagai cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain jika mencapai atau memperoleh target yang ditetapkan, berarti ada penghargaan dan jika sebaliknya ada teguran bahkan pemutusan hubungan kinerja.

3. Kreditor (*Creditor*)

Apakah dana yang dipinjam perusahaan serta konsekuensinya (bunga) dapat dibayar dan pokok pinjaman yang harus dikembalikan.

4. Pemerintah (*Government*)

Apakah perusahaan jujur melaporkan laporan keuangan sesungguhnya, sudah tentu berkaitan dengan kewajiban pajak yang dibayar kepada pemerintah atau negara secara adil dan jujur.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan yakni pemilik atau pemegang saham (*stock holder*), manajemen (*management*), kreditor (*creditor*) dan pemerintah (*government*)

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Ini berarti laporan keuangan merupakan suatu kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Analisis” sendiri didefinisikan sebagai berikut “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulannya yakni analisis laporan keuangan merupakan proses untuk membedakan laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur-unsur tersebut dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan.

2.3.2 Metode dan Alat Analisis Laporan Keuangan

Secara umum metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Metode Analisis Horizontal (Dinamis)

Metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda.

2. Metode Analisis Vertikal (Statis)

Metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk periode yang sama. Disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Teknik-teknik yang termasuk dalam metode ini antara lain analisis persentase per komponen (*common size*) analisis rasio dan analisis impas.

Sedangkan alat analisis laporan keuangan menurut (Subramanyam K.R:2013) yaitu:

1. Analisis Laporan Keuangan Komparatif
Analisis laporan keuangan komparatif (*comparative financial statement analysis*) dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya.
2. Analisis Laporan Keuangan *Common-Size*
Analisis *Common-Size* dilakukan untuk meneliti pos-pos yang membentuk sekelompok tertentu. Perbandingan waktu atas laporan *Common-Size* perusahaan bermanfaat untuk mengungkapkan perubahan proporsional pos.
3. Analisis Rasio
Analisis rasio (*ratio analysis*) merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Agar bermakna, sebuah rasio harus mengacu pada hubungan ekonomis yang penting. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio.
4. Analisis Arus Kas
Analisis arus kas (*cash flow analysis*) terutama digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana.

Analisis arus kas menyediakan pandangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan menggunakan sumber.

5. Valuasi

Valuasi merupakan hasil penting dari berbagai jenis analisis bisnis dan laporan keuangan. Valuasi biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Dasar valuasi adalah teori nilai sekarang (*present value theory*). Teori ini menyatakan bahwa nilai utang atau efek ekuitas (atau untuk masalah ini, segala aset) sama dengan jumlah seluruh hasil yang diharapkan dari efek di masa depan yang didiskontokan ke saat ini dengan menggunakan tingkat diskonto yang tepat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan metode analisis laporan keuangan yakni metode analisis horizontal (dinamis) dan metode analisis vertikal (statis). Sedangkan alat analisis laporan keuangan terdiri dari analisis laporan keuangan komparatif, analisis laporan keuangan *Common-Size*, analisis rasio, analisis arus kas dan valuasi.

2.3.3 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2014:68), tujuan dari analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode tertentu.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau tidak.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tujuan analisis laporan keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan, kelemahan dan kekuatan perusahaan, langkah-langkah perbaikan, penilaian kinerja manajemen dan pembandingan dengan perusahaan sejenis.

2.4 Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi merupakan ukuran penilaian kinerja koperasi yang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan pertumbuhan, perkembangan dan keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian kesehatan koperasi memiliki peranan penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010:203) kesehatan koperasi merupakan suatu indikator untuk kinerja pengurus atau pengelola koperasi yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Tujuan dari penilaian kesehatan koperasi yakni menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap koperasi, mengetahui kinerja koperasi, melindungi harta kekayaan koperasi dan para penabung. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepatuhan koperasi pada peraturan yang berlaku. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi menjadi sarana dalam menetapkan strategi usaha koperasi di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan. Sedangkan, predikat kesehatan koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Berdasarkan penjelasan di atas kesehatan koperasi yang telah dikemukakan, maka dapat dinyatakan bahwa penilaian kesehatan koperasi merupakan ukuran penilaian kinerja koperasi yang memiliki peranan penting bagi kemajuan koperasi dengan tujuan menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

2.5 Penilaian Kesehatan Koperasi

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016 adalah

peraturan yang mengatur tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional. Penilaian aspek menggunakan nilai 0 sampai dengan 100 yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Permodalan		15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang Diterima yang Berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	5
		d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5

No.	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Manajemen Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rasio Rentabilitas Asset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3	
		b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	Jati Diri Koperasi			10
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$		

No.	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota $\frac{PEA}{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib} \times 100\%$	3	
Jumlah			100	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.1 berisi rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai kesehatan koperasi pada Kopkar Patra PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Aspek permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Modal sendiri merupakan total ekuitas yang ada pada koperasi. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha bertambah atau berkurang. Rasio permodalan terdiri dari:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
 2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
 3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
 4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan
- Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq x < 20$	25	6	1,50
$20 \leq x < 40$	50	6	3,00
$40 \leq x < 60$	100	6	6,00
$60 \leq x < 80$	50	6	3,00
$80 \leq x < 100$	25	6	1,50

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x < 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Rasio kualitas aktiva produktif terdiri dari:

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 - 50	10	10	5,00
51 - 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

- 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
- 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan
- 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).

2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

1. Perhitungan penilaian:

- Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
- Untuk setiap penurunan rasio sebesar 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah
terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
≤ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x < 40$	20	5	1,0
$20 < x < 30$	40	5	2,0
$10 < x < 20$	60	5	3,0
$0 < x < 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah Dihitung dengan Cara sebagai berikut:
1. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
 2. Untuk setiap kenaikan 1% yang dimulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
 3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.
- Untuk lebih jelasnya mengenai standar rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap
Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 - 10	10	5	0.5
11 - 20	20	5	1,0
21 - 30	30	5	1,5
31 - 40	40	5	2,0
41 - 50	50	5	2,5
51 - 60	60	5	3,0
61 - 70	70	5	3,5
71 - 80	80	5	4,0
81 - 90	90	5	4,5
91 - 100	100	5	5,0

- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan
Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan yang dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap
Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
25 - 30	50	5	2,50
21 - 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

3. Aspek Manajemen

Aspek manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen koperasi yang diterapkan. Aspek manajemen meliputi lima komponen yakni manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen yang terdiri atas:

a. Manajemen umum

Manajemen umum terdiri dari 12 pertanyaan (memperoleh bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"). Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen umum dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	0,10
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan terdiri dari 6 pertanyaan (memperoleh bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"). Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen kelembagaan dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan terdiri dari 5 pertanyaan (memperoleh bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"). Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen permodalan dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva terdiri dari 10 pertanyaan (memperoleh bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"). Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen aktiva dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas terdiri dari 5 pertanyaan (memperoleh bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"). Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen likuiditas dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

4. Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal koperasi berarti semakin baiklah efisiensi suatu koperasi. Aspek efisiensi koperasi didasarkan pada tiga rasio, yaitu:

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$\leq 95 - < 100$	50	4	2
$\leq 90 - < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio yang berada antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot 2% diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

5. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi. Penilaian likuiditas didasarkan atas:

a. Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar

Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai sebesar 100, untuk rasio yang lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio yang lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio yang lebih dari 20% diberi nilai 25. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 10% diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan kas dan bank terhadap kewajiban lancar dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10

$15 < x \leq 20$	50	10	5
>20	25	10	2,5

- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima
Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima, untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, untuk rasio rentabilitas aset yang lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio rentabilitas aset dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
>10	100	3	3,00

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Untuk

lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Untuk rasio kemandirian operasional yang lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai sebesar 0, dan untuk rasio yang lebih besar dari 100% diberi nilai sebesar 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio partisipasi bruto dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio PEA dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap tujuh komponen sebagai mana dimaksud pada tabel 2.1, diperoleh bobot penilaian skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat koperasi. Penetapan predikat koperasi dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Penetapan Predikat Koperasi

Skor	Predikat
$80 \leq x \leq 100$	Sehat
$66 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
< 51	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016